FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA MENURUT PANDANGAN KETUANYA

Tulisan ini merupakan hasil wawancara redaktur Jurnal Pustakawan Indonesia yang sedianya akan diterbitkan pada volume III yang lalu. Namun karena satu dan lain hal, jurnal ini tidak sempat terbit. Rakerpus IPI meminta Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia untuk menyampaikan pendapat mengenai forum perpustakaan dalam Wacana Forum. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya sejak awal berdirinya FPPTI ini, dan dokumen yang paling murni keluar dari pemikiran saya adalah hasil wawancara ini, karena dilakukan beberapa saat setelah saya terpilih menjadi Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Berikut hasil wawancara tersebut.

T: Sehubungan dengan terpilihnya Bapak sebagai ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, apakah rencana Bapak dengan Forum ini

J: Pertama, tentu merealisasikan program yang sudah dimandatkan oleh Munas antara lain seperti memperjuangkan peningkatan status perpustakaan khususnya PTS. Namun sebelum itu saya kira kita perlu meyakinkan pimpinan, khususnya pimpinan perguruan tingginya bahwa perpustakaan itu mempunyai posisi strategis bagi kemajuan perguruan tingginya. Supaya perpustakaan itu diperhatikan, maka terhadap perpustakaan perlu dilakukan standarisasi. Misalnya perpustakaan seperti apa yang dapat mendukung atau memajukan perguruan tinggi. Nah, untuk itu perlu ada akreditasi terhadap perpustakaan perguruan tinggi yang hasilnya diumumkan kepada masyarakat dimana datanya setiap saat dapat diakses, misalnya disimpan di internet. Jadi nantinya masyarakat bisa mengecek kebenarannya bila ada perguruan tinggi yang berpromosi di koran atau media elektronik bahwa perguruan tingginya dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir.

T: Bagimana peta kedudukan Forum ini di dunia perpustakaan di Indonesia, dalam artian bagaimana hubungan Forum ini dengan Perpustakaan Nasional RI, dengan Ikatan Pustakawan Indonesia, dan lain sebagainya?

J: Saya kira terhadap perpustakaan Nasional Forum ini memposisikan diri sebagai partner dalam melakukan pembinaan perpustakaan perguruan tinggi. Perpusnas mempunyai mandat untuk melakukan pembinaan dan secara kelembagaan Perpusnas mempunyai kekuatan. Namun mereka kekurangan SDM khususnya bila ingin membina perpustakaan PT. Kita tahu banyak perpustakaan PT yang sudah sangat kuat dan merasa tidak perlu pembinaan. Oleh karena itu menurut saya pembinaan terhadap perpustakaan perguruan tinggi oleh perpusnas harus dilakukan dalam format yang lain. Misalnya saja perpustakaan PT melalui Forum bekerjasama dengan perpusnas mengeluarkan konsep, strategi, dan sebagainya yang bersifat strategis dan kita usulkan kepada pemerintah. Contoh, misalnya sekarang ini koleksi digital di perpustakaan sudah mulai berkembang. Tetapi produk hukum yang mengatur bagaimana koleksi tersebut dilayankan, bagaimana koleksi tersebut dikopi, di"download", diperbanyak dan sebagainya belum ada aturannya. Disini perpusnas dan forum bisa memikirkan dan memberi masukan kepada pemerintah agar produk hukum yang mengatur segala sesuatu menganai layanan digital tersebut bisa dibuat. Bila hal itu sulit, setidak-tidaknya kode etik pelayanan koleksi digital tersebut di perpustakaan bisa dibuat oleh forum dan perpustakaan nasional. Terhadap IPI forum ini merupakan partner dalam membina para pustakawannya. IPI versi sekarang ini kan sangat beragam, sehingga kepentingan anggota yang berasal dari kelompok perpustakaan tertentu sangat berbeda dibandingkan dengan kelompok pustakawan yang lain. Kepentingan kelompok pustakawan yang berasal dari PT yang sangat maju akan sangat berbeda dibandingkan dengan pustakawan dari perpustakaan sekolah yang sangat kurang maju. Nah bila kelompok yang merasa punya kepentingan yang sama berkumpul untuk memperjuangkan cita-citanya, kan mestinya tidak salah. Di Inggris misalnya selain ada LA (Library Association) yang merupakan organisasi profesi pustakawan, ada juga college library association (?). Jadi forum ini bukan organisasi sempalan dari IPI yang dilahirkan karena kecewa terhadap kinerja IPI, tapi merupakan organisasi lahir dan bercita-cita bersama-sama IPI dapat saling bersinergi memperjuangkan nasib para pustakawan Indonesia. Esensi kedua organisasi inipun sebenarnya berbeda. IPI merupakan organisasi pustakawan dimana anggotanya merupakan pustakawan secara individu, sedangkan forum merupakan organisasi perpustakaannya atau lembaganya. Jadi yang menjadi anggota adalah lembaganya. Karena itu syarat menjadi ketua forum adalah pustakawan yang sedang menjabat sebagai kepala perpustakaan.

T: Dari data yang Bapak miliki saat ini dan dari pertemuan-pertemuan dengan pustakawan perguruan tinggi, sebenarnya bagaimana kondisi perpustakaan perguruan tinggi pada saat ini?
J: Sangat menyedihkan. Bayangkan, ada perpustakaan perguruan tinggi yang sangat miskin. Ratio buku terhadap mahasiswa bahkan kurang dari 0,5 artinya jumlah koleksi perpustakaan tersebut tidak sampai setengah dari jumlah mahasiswanya. Kalau perpustakaan tersebut dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang canggih barangkali masih beruntung, karena mahasiswa di PT tersebut mempunyai kesempatan untuk akses informasi ke internet ataupun CD. Yang menyedihkan adalah sudah koleksinya miskin, di perpustakaan tersebut tidak ada satupun komputer yang bisa dipakai misalnya untuk membaca koleksi CD. Apalagi akses ke internet. Dalam kesempatan munas FPPTI yang lalu misalnya, ada seorang kepala perpustakaan yang mendapatkan hadiah CD-ROM artikel lengkap (fulltext article). Sesudah ditanya apakah perpustakaannya punya komputer apa tidak, ternyata jawabannya tidak. Bagaimana dia mau akses ke sumber informasi yang ada disekelilingnya. Padahal sekarang ini banyak lembaga yang memproduksi informasi melalui CD-ROM dan bisa diperoleh gratis, atau setidak-tidaknya hanya mengganti ongkos mengkopi dan kirim saja. Nah, kalau di perpustakaan dilengkapi dengan alat baca CD-ROM kan keterbatasan koleksi perpustakaan tersebut bisa sedikit diatasi. Perpustakaan yang walaupun jumlah koleksinya tidak banyak, namun ia bisa melakukan akses ke sumber informasi global sangat sedikit. Satu contoh, perpustakaan sekolah di Buin Batu, Sumbawa, walaupun sekolah itu ada di tengah hutan dan sulit dicapai lokasinya, namun mereka tidak pernah ketinggalan informasi. Mereka dilengkapi dengan komputer multimedia mutakhir (pentium III) dengan jumlah yang saya kira sangat cukup (12 unit) dan semua komputer sudah terhubung ke internet 24 jam dengan speed yang sangat cepat.

T: Apakah selama ini usaha pemerintah, dalam hal ini terutama Departemen Pendidikan Nasional, sudah cukup kuat untuk meningkatkan peran perpustakaan di masyarakat?
J: Bisa ya, bisa tidak. Untuk PTN sebenarnya pemerintah sudah berusaha keras. Sejak akhir dekade 70an Dirjen Dikti telah membentuk apa yang dinamakan Satgas Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Tugasnya adalah memberi masukan dan program kepada Dirjen Dikti dalam rangka peningkatan perpustakaan perguruan tinggi. Dari program satgas ini dilahirkan banyak pustakawan yang cukup bermutu. Beberapa program yang telah dilakukan adalah pendidikan sertifikat bagi sarjana non perpustakaan yang bekerja di perpustakaan (diselenggarakan di JIP-FSUI), program gelar ganda yaitu program pendidikan sarjana perpustakaan bagi sarjana non perpustakaan (diselenggarakan di JIP-FSUI dan UNPAD), program pendidikan D2 dan D3 bagi staf yang berijasah SMA yang sudah bekerja di perpustakaan (diselenggarakan di IPB, UNAIR, UNHAS) dan program pendidikan pasca sarjana baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu banyak program pelatihan dan magang telah dilakukan. Dibidang pengembangan fisik dan koleksi telah banyak dilakukan misalnya melalui bantuan Bank Dunia, ADB dan sebagainya. Konon sebuah sumber di internet mengatakan Bank Dunia telah mengucurkan bantuan (kredit tentunya) untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia tidak kurang dari 1,65 trilyun rupiah. Ini belum termasuk dari ADB, CIDA dan sumber-sumber lain. Tapi hasilnya masih belum terlalu menggembirakan. Namun perhatian pemerintah seperti ini belum terjadi untuk PTS. Bukan berarti tidak ada, sudah ada tetapi masih kurang. Konsep pembinaan perpustakaan dari dikti adalah membina yang kuat sehingga yang kuat dapat membantu yang lemah. Karena itu ada program pemerintah yang disebut dengan PUSYANDI atau Pusat Layanan Disiplin Ilmu. Pusyandi inilah yang diharapkan dapat memberi layanan kepada perpustakaan-perpustakaan yang lemah.

T: Seharusnya bagaimana sebuah perpustakaan di perguruan tinggi itu?
J: Saya melihat kelemahan sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi adalah pada “leadership”. Kedudukan perpustakaan di perguruan tinggi tidak menguntungkan. Dengan PP 5 tahun 1980, PP 30 tahun 1990 maupun PP 60 tahun 1999 kedudukan perpustakaan di perguruan tinggi hanya setingkat eselon 3 atau setingkat dengan kepala bagian. Dengan kedudukan ini akses kepala perpustakaan ke pimpinan universitas sangat lemah. Ia misalnya tidak dimasukkan dalam kelompok pimpinan sehingga dalam rapat pimpinan tidak pernah dilibatkan. Ia juga tidak masuk dalam senat universitas. Jadi perpustakaan tidak mempunyai

wakil untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan posisi yang rendah dalam jangka panjang ini, maka di perpustakaan telah terjadi degradasi kepemimpinan. Tidak ada lagi Doktor yang mau menjadi kepala perpustakaan. Bahkan di daerah jika ada pegawai perpustakaan yang bisa meraih gelar master, maka dipastikan pegawai tersebut segera minta pindah status menjadi dosen. Nah, seharusnya posisi perpustakaan di perguruan tinggi setingkat lembaga atau dekan. Dengan posisi yang demikian saya yakin akan banyak staf yang bergelar master atau bahkan doktor berkeinginan menjadi kepala perpustakaan. Ini akan meningkatkan "leadership" di perpustakaan, walaupun doktor atau master tersebut bukan jaminan. Di PP 61 tahun 1999 posisi perpustakaan sudah lebih baik. Kepala perpustakaan misalnya secara ex-officio menjadi anggota senat universitas, padahal profesor saja untuk menjadi anggota senat universitas harus dipilih. Tapi PP 61 ini kan diberlakukan hanya pada empat universitas yang akan segera menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Untuk perguruan tinggi yang lain posisinya masih tetap.

T: Seperti sudah diketahui oleh banyak orang bahwa minat baca di masyarakat kita masih rendah, begitu pula dengan para mahasiswa kita. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan?
J: Untuk meningkatkan budaya baca bukan hanya tanggung jawab perpustakaan, melainkan tanggung jawab semua unsur masyarakat. Kebiasaan membaca harusnya ditumbuhkan sejak orang itu mulai mengenal huruf. Jujur saja sekarang, bagi keluarga kelas menengah atas, berapa banyak orang tua yang mengajak anaknya yang masih TK atau SD ke toko buku? Berapa persen pengeluaran mereka untuk membeli buku dibandingkan dengan dengan pengeluarannya untuk beli mainan, atau bahkan makan di restoran? Nah, budaya membaca masyarakat kita memang tidak pernah dibentuk dari kecil. Dan ini juga terjadi di perguruan tinggi. Berapa banyak dosen yang memberi tugas membaca kepada mahasiswanya? Berapa banyak dosen yang membuat soal ujian bersumber dari buku teks? Bahkan pada waktu saya kuliah dulu ada istilah ***diktator*** dimana dosen selain bertugas mengajar ia juga memproduksi diktat. Semua soal ujian akan keluar dari diktat tersebut. Kalau mahasiswa dengan membaca diktat saja sudah bisa memperoleh nilai A mengapa dia harus datang ke perpustakaan untuk membaca buku teks yang bahasanya kurang mereka kuasai? Di masyarakatpun dikembangkan kebiasaan bersaing untuk tinggi-tinggian nilai, sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya ***membeli*** nilai untuk menjadi ranking baik di kelasnya. Kalau ingin meningkatkan minat baca bagi mahasiswa, saya kira kita harus bekerjasama dengan dosen. Dosen kita minta mewajibkan mahasiswanya membaca buku atau lebih tepatnya mencari informasi yang ada di perpustakaan. Dilain pihak perpustakaannyapun harus dibina dengan baik seperti dilengkapi dengan informasi atau koleksi mutakhir, dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai, disediakan ruang yang cukup dan nyaman, disediakan SDM yang profesional. Nah, untuk bisa begini inilah diperlukan "leadership" tadi. Kepala perpustakaan harus mempunyai akses yang cukup serta mampu bicara dengan pimpinan universitas.

T: Bagaimana dengan sikap dan pandangan dosen terhadap perpustakaan pada umumnya?
J: Saya kira sebagian besar dosen menganggap perpustakaan tidak begitu penting. Artinya mereka tidak menganggap perpustakaan sepenting laboratorium misalnya. Apalagi dibandingkan dengan lembaga penelitian dan lembaga pengabdian pada masyarakat. Mereka sering mengatakan perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi hanya sebatas retorika saja. Buktinya sedikit sekali usaha dosen untuk memajukan perpustakaan, misalnya memprotes pimpinan karena anggaran perpustakaan terlalu kecil dll. Kalau orang perpustakaan yang berjuang untuk menaikkan anggaran kan kurang kuat. Seharusnya dosen dan mahasiswa sebagai pemakai yang memprotes jika perpustakaan tidak mampu menyediakan informasi dan fasilitas untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya.

T: Untuk meningkatkan citra perpustakaan, tentunya pihak penyelenggara perpustakaanpun perlu dibenahi. Adakah yang perlu dikoreksi dari pustakawannya, baik dipandang dari sikapnya maupun dari segi pendidikan calon pustakawan?
J: Pertama, kepala perpustakaan harus mempunyai leadership. Ia harus mampu meyakinkan pimpinan bahwa perpustakaan bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar dan membanggakan universitas. Jangan hanya bisa menuntut tanpa bisa memberi bukti kepada pimpinan. Kedua, karena kita di perguruan tinggi dimana status akademis menjadi sesuatu yang wajib dimiliki, maka kepala perpustakaan tersebut sekurang-kurangnya harus bergelar master bahkan doktor jika perlu, tentu dibidang PUSDOKINFO. Ketiga, pustakawan sekarang dan masa depan harus menguasai teknologi informasi sehingga ia tidak alergi

terhadap TI. Sering pustakawan menghindar dari TI karena ia tidak faham dan tidak mempunyai visi teknologi. Karena itu kurikulum pendidikan perpustakaan perlu dilihat kembali. Paling tidak 40 persen materi kuliahnya menyinggung masalah TI. Misalnya saja pengetahuan bahan rujukan umum tidak bisa lagi hanya mengenalkan ensiklopedi konvensional sebab ensiklopedi sekarang kan sudah diproduksi dalam bentuk digital, juga katalogisasi kan bisa dilakukan dengan *copy cataloging* ke OCLC, dsb. Keempat, pustakawan harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga ia dapat memberi pelayanan yang memuaskan pemakai. Ia harus bisa bersikap profesional sebagai seorang pelayan. Coba kita datang ke hotel berbintang atau ke biro perjalanan internasional, kan mereka memperlakukan kita sangat baik sehingga kita merasa senang dan dihormati. Padahal mereka belum tahu apakah kita mau menggunakan jasa mereka atau sekedar ketemu kenalan saja kesana. Kelima, pustakawan harus diberi gaji yang cukup. Walaupun saya sebut terakhir, bukan berarti hal ini kurang penting. Pustakawan yang mempunyai gaji cukup akan betah dan tekun melayani pemakainya. Jangan sampai putakawan tersebut harus dikejar-kejar waktu untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau dosen yang bisa nyambi ngajar dan meneliti dimana-mana diberi tunjangan fungsional yang besar, mengapa pustakawan yang dituntut harus selalu siap melayani tidak diberi tunjangan yang sama dengan dosen misalnya. Mungkin cita-cita saya terlalu tinggi untuk minta tunjangan sama dengan dosen. Tapi saya melihat di ***University of Hull*** ada yang disebut dengan *academic related staff* dimana gaji pustakawan dipadankan dengan gaji dosen. Mungkin tingkatan tertinggi dan terendahnya tidak sama, tetapi ada yang berimpit sehingga pengasilan pustakawan dengan dosen itu tidak terlalu jomplang seperti disini. Coba lihat tunjangan pustakawan utama, kan hanya 20 % dari tunjangan guru besar. Padahal kesempatan untuk mencari tambahan bagi guru besar kan lebih luas. Dengan kondisi demikian sulit kita meminta pustakawan untuk tekun dan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai.

T: Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi informasi di masyarakat Indonesia, bagaimana pengaruhnya terhadap perpustakaan?
J: Saya kira sangat besar dan negatif. Anak-anak sekarang lebih suka main *play station* atau nonton televisi daripada membaca. Karena itu saya menyarankan agar perpustakaan juga menyediakan koleksi multimedia. Perpustakaan umum kalau perlu menyediakan koleksi CD game, tentu yang ada unsur mendidiknya dan bisa dimainkan di komputer multimedia baik yang ada di perpustakaan atau dipinjam untuk dimainkan di rumahnya. Juga menyediakan koleksi VCD film maupun lagu. Kalau perlu disewakan dengan harga yang lebih murah dari harga penyewaan di rental umum. Pengalaman saya waktu di Inggris sering meminjam koleksi lagu dan film VCR di perpustakaan umum. Saya yakin perpustakaan umum akan lebih ramai.

T: Apakah pustakawan Indonesia siap untuk bersaing secara global?
J: Siap enggak siap, ya harus siap. Jika tidak kita jadi penonton di negeri sendiri. Jangan sampai perpustakaan kita dipimpin oleh orang Philippine misalnya dan kita hanya sekedar anak buah. Karena itu kita harus berkampanye untuk menyiapkan diri agar kita mampu bersaing dengan kolega kita yang ada di negara tetangga.